

4. Biaya Pelaksanaan Kegiatan


Anggaran kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) dibebankan pada DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Dukcapil Provinsi Sumatera Barat TA 2019 pada rekening kegiatan : 1.02.08.01.112.001, dengan anggaran sebesar Rp41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) -

KEPALA BIDANG KIE &
KESUKSESRIYAN KELUARGA
Selaku KPA



ROZA ARIYANTI, S.Si, M.I.
NIP. 19700331 199701 2 001

Padang, 2 Januari 2019.

KASI PEMBUDAYAAN
KEKAWAHLANAN KELUARGA
Selaku PPTK


M. SYARIFUDDIN, SH
NIP. 19670212 199103 1 012

Mengetahui :
KEPALA DINAS PPKBRPS
PROVINSI SUMATERA BARAT.


H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI
KELUARGA BERENCANA (KIE KB)
TAHUN 2019**

Unit Organisasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
Program	: Keluarga Berencana
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya pemahaman dan wawasan tentang KKBPK
Kegiatan	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB)
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersebarluaskannya Informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Keluaran (Output)	: Penyebarluasan Informasi tentang Program KKBPK
Kelompok Sasaran	: OPD KB Kab./Kota, Ormas/Orsos dan Masyarakat

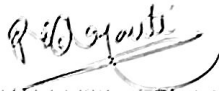
A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. : 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. : 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

4. Biaya Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal pada
DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 pada rekening kegiatan :
1.02.08.01.112.004 sebesar Rp.71.586.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus
delapan puluh enam ribu rupiah) -

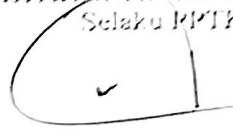
KEPALA BIDANG KB &
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Selaku EPA



ROZA ARIYANTI, S.Si, MT
NIP. 19700331 199701 2 001

Padang, 2 Januari 2019

KASI PEMBERDAYAAN
KETAHANAN KELUARGA
Selaku PPTK



M. SYARIFUDDIN, SH
NIP. 19670212 199103 1 012

Mengetahui :
KEPALA DINAS PPKBKPS
PROVINSI SUMATERA BARAT,



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUNG KB
SESUAI KEARIFAN LOKAL
TAHUN 2019**

Unit Organisasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Program	: Program Keluarga Berencana
Hasil (Outcome)	: Terciptanya Keterpaduan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kampung KB
Kegiatan	: Pengembangan Kampung KB sesuai kearifan lokal
Indikator Kinerja Kegiatan	: Integrasi Program/Kegiatan OPD Terkait Provinsi pada 19 Kampung KB di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Keluaran (Output)	: Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan di Kampung KB sesuai Kearifan Lokal
Kelompok Sasaran	: OPD terkait Provinsi, OPD PPKB Kab/Kota serta Masyarakat Kampung KB

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. : 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor` 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

d. Kurang termotivasinya ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai KK Model penunjang program KKBPK

e. Biaya yang Diperlukan

Anggaran Kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Berencana dibebankan pada DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 pada rekening kegiatan : 1.02.08.01.112.002 dengan anggaran pendukung kegiatan sebesar Rp.110.000.000.- (Seratus sepuluh juta rupiah)

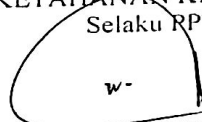
KEPALA BIDANG KB &
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Selaku KPA



ROZA ARYANTI, S.Si, MT
Pembina
NIP. 19700331 199701 2 001

Padang, 28 Desember 2018.

KASI PEMBERDAYAAN
KETAHANAN KELUARGA
Selaku RPTK



M. SYARIFUDDIN, SH
Penata Tk I
NIP. 19670212 199103 1 012

Mengetahui :
KEPALA DINAS PPKBKPS PROVINSI
SUMATERA BARAT.



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROMOSI DAN TEMU KARYA PROGRAM
KELUARGA NASIONAL
TAHUN 2019**

Unit Organisasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, & Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Program	: Keluarga Berencana
Hasil (Outcome)	: Tersebarluasnya informasi KKBPK dan ketahanan keluarga menuju sejahtera keluarga
Kegiatan	: Promosi & Temu Karya Program Keluarga Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan	: Meningkatnya peran serta ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam program KKBPK
Keluaran (Output)	: Mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HARGANAS, Terlaksananya pembekalan Ketahanan Keluarga dan Penyerahan Hadiah Lomba KK Model
Kelompok Sasaran	: Keluarga dan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD Terkait

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- d) Keputusan Presiden RI Nomor : 39 Tahun 2014 tentang penetapan setiap tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah